

## **ANALISIS EFEKTIVITAS PDAM TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN LAMONGAN (EFFECTIVENESS ANALYSIS PDAM TO INCREASE LOCAL REVENUES IN LAMONGAN)**

*\*(Edie Sugiarto  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Lamongan*

### **ABSTRAK**

*Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah. Bagian Laba Penyertaan Modal BUMD adalah bagian dari Pendapatan asli Daerah yang masuk dalam hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dalam Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat istilah Target dan Realisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan kontribusi hasil perusahaan milik daerah (pendapatan perusahaan Daerah) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lamongan, Untuk mengetahui efektivitas Laba Penyertaan Modal BUMD di kabupaten Lamongan.*

**Kata Kunci : Laba PDAM , Laba Penyertaan Modal BUMD, Pendapatan Asli Daerah.**

### **PENDAHULUAN**

Otonomi Daerah terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan / kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan banyak faktor pendukung. Sumber Pembiayaan Daerah atau PAD (Pendapatan Asli Daerah) komponen utamanya berasal dari komponen pajak Daerah dan Retribusi Daerah. SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) adalah konstruksi keuangan daerah yang memiliki fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan fungsi Pemerintahan Daerah, maka sistem akuntansi pemerintahan harus mencakup kedua sistem tersebut. Dalam pelaksanaan di lapangan, sistem akuntansi Pemerintahan Daerah tersebut dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD. Akuntansi realisasi pendapatan SKPKD harus didukung dengan bukti-bukti sah berupa SKP Daerah, Tanda bukti

pembayaran, STS (Surat Tanda Setoran) dan bukti-bukti yang sah lainnya. Disisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi fasilitator bagi para pelaku ekonomi seperti masyarakat, perusahaan dan lembaga keuangan dalam menentukan kebijakan dan membuat peraturan-peraturan bagi kepentingan daerah. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk siap menghadapi otonomi daerah tersebut. Pemerintah Daerah akan lebih leluasa dalam mengelola pajak daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah setelah otonomi daerah diberlakukan. Hal ini dapat

dilakukan dengan persyaratan usaha dan strategi tertentu mengingat kondisi BUMD yang masih memprihatinkan.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui efektivitas Laba PDAM terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan.

Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan bebas dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. PAD yang terdiri dari :

a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa langsung dipaksakan.

- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil maupun materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetatinya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan maka sifat perubahan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, restibusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”.

Menurut Elita Dewi (2002:4) mengenai perusahaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat: Memberi jasa, Menyelenggarakan pemanfaatan umum, Memupuk pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

Selanjutnya *Digital*

*Library* ([www.google.co.id](http://www.google.co.id))

diakses tanggal 25 juli 2008) menyebutkan Perusahaan Daerah adalah: “Suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota

dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas atau badan yang ditunjuknya”.

### **PDAM**

Sistem penyediaan air bersih di Lamongan dibangun sejak tahun 1919 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat itu dibangunlah Bronckaptering Sumber Bulus Kecamatan Mantup. Disamping pembangunan Bronckaptering juga dibangun pula menara air minum pada tahun 1924 di Alun-Alun Lamongan dengan kapasitas produksi 30 l/dt.

Selanjutnya, pada tahun 1954, pengelolaan air bersih dikelola Instansi Dinas Air Minum Kabupaten Lamongan dengan kapasitas 25 l/dt. Dalam rangka peningkatkan pelayanan air bersih berkaitan adanya kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan sarana air bersih, maka pada tahun 1982 terjadi alih status pengelolaan menjadi Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang operasionalnya dibawah dan bertanggungjawab kepada proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB) Jawa Timur.

Untuk memenuhi kuota air bersih di kota Lamongan, telah membangun Water Treatment Plant (WTP) di Babat pada tahun 1982 dengan mengambil air baku dari bengawan solo. Kapasitas produksi air pada saat itu sebesar 60 l/dt yang melayani pelanggan sebanyak

4.248 sambungan baru dan 78 hidran umum.

Dalam pengembangan perusahaan seiring dengan Pembangunan daerah khususnya pembangunan dibidang penyediaan air bersih di kabupaten Lamongan. Maka tahun 1991 terjadilah alih status pengelolaan menjadi Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamongan dengan Landasan Hukum Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan No.5 tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan Nomor 89 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan Nomor 5 tahun 1982. Mengingat Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan No.5 Tahun 1982 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan perusahaan, maka dilakukan perubahan dengan peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2001.

Cakupan layanan PDAM di tahun 2013 mencapai 6 persen dari seluruh penduduk Lamongan dengan kapasitas terpasang mencapai 330 liter perdetik. Dari 27 kecamatan di Lamongan, PDAM melayani 11 kecamatan untuk 12.740 sambungan rumah (SR) dengan jumlah penjualan air mencapai 3.040.472 meter kubik. Sementara tarif dasar rekening air (TDRA) yang saat ini

dikenakan kepada pelanggan PDAM adalah sebesar Rp 2.500 per meter kubik. Sedangkan tarif lama adalah Rp 1.540 per meter kubik. Dari catatan tersebut, di akhir tahun 2013 PDAM mampu meraup pendapatan hingga Rp 12.834.427.797(Surya Online, Lamongan 29 Jan 2015).

Untuk mendapatkan air bersih, PDAM Lamongan harus mengubah instalasi dan sarana pendukung dengan estimasi biaya Rp 86 miliar. Pengerjaan dilaksanakan secara bertahap sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan 2007. Perusahaan Daerah Air Minum Lamongan bukan saja menghadapi persoalan keluhan pelanggan. PDAM Lamongan juga menanggung utang yang membengkak dari pinjaman pokok Rp 7,5 miliar tahun 1996 menjadi Rp 25 miliar pada 2008. Direktur Utama PDAM Lamongan Sutrisno, Jumat (18/4), mengatakan, kondisi serupa juga dialami PDAM lain yang mendapatkan kucuran pinjaman Bank Dunia saat itu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. (kompas.com 29 Jan 2015).

Visi : terwujudnya pelayanan yang prima pada tahun 2015 dan mampu berkembang untuk meningkatkan cakupan pelayanan masyarakat.

Misi :

1. Meningkatkan pelaksanaan organisasi dibidang pemasaran/pelayanan
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih dan

- pengadaan sarana prasarana yang memadai dibidang produksi dan distribusi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bergerak entrepreneurial, mampu mengembangkan manajemen perusahaan secara tuntas, mempunyai inovatif, kreatif, berani menghadapi resiko dan tidak mudah menyerah dengan hambatan-hambatan
  4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta pengawasan pengelolaan perusahaan dibidang keuangan untuk dapat menghasilkan pendapatan yang dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan (full Cost Recovery)
- Prioritas kegiatan :
1. Meningkatkan produksi air
  2. Perbaikan jaringan perpipaan dan meter air
  3. Meningkatkan kinerja PDAM
  4. Program penurunan non renews water / tingkat kehilangan air
  5. Optimalisasi pemasaran/pelayanan pelanggan
  6. Peningkatan sumber daya manusia
  7. Penyehatan keuangan perusahaan
  - 8.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Kualitatif ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif yaitu

menggambarkan atau menguraikan sesuatu secara utuh dalam bentuk tulisan, dengan menyelidiki data-data kualitatif yang berupa tabel pendapatan / laba bersih Perusahaan Daerah Kabupaten Lamongan. Sedang analitis yaitu menganalisa, mengupas secara sistematis atau terstruktur dan teratur sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan sesuatu secara utuh dalam bentuk tulisan yang dianalisis atau diuraikan secara sistematis.

Suharsimi Arikunto (2001 : 15) Populasi adalah serangkaian atau sekumpulan subyek yang mempunyai satu atau lebih, ciri-ciri menonjol dalam satuan obyek. Populasi menurut Sugiono (2005 : 55) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa Laba Penyertaan Modal BUMD yang dilihat dari Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2010 - 2014.

### **Sampel**

Suharsimi Arikunto (2001 : 17) sampel secara sederhana dapat didefinisikan secara obyek, wilayah atau peristiwa yang akan dijadikan sebagai cerminan obyek penelitian dengan karakteristik dan ciri-ciri yang sesuai dengan populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah PDAM Kab. Lamongan. Dengan pengamatan pada Laporan Pendapatan atau Laba penyertaan modal PDAM tahun 2010 - 2014.

### **Teknik sampling**

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik non-random sampling atau Purposive Sampling. Yaitu peneliti

mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu untuk mengkaji kontribusi hasil perusahaan milik daerah (pendapatan perusahaan Daerah), efektivitas dan tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan daerah kabupaten Lamongan yang mempengaruhi PAD.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data, mengantisipasi resiko bias karena obyek penelitian non-random sampling. Data yang dikumpulkan dengan cara depth interview dikumpulkan langsung dari sumber data yang sesuai dengan kriteria. Data dari sampel langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap kontribusi Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Lamongan.

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas menurut Jones & Pendlebury seperti yang dikutip oleh Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2004:164) adalah keberhasilan atau kegagalan dari sebuah organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

Berikut langkah untuk menghitung efektivitas Laba BUMD :

1. Membagi realisasi Laba Usaha Daerah dengan target Laba Usaha Daerah
2. Setelah didapat hasil pembagian dikalikan 100 %
3. Hasil presentase yang didapat kemudian dibandingkan dengan kriteria efektivitas.

Perhitungan efektivitas menggunakan Rumus :

$$\text{Efektivitas Laba BUMD} = \frac{\text{Realisasi laba penyertaan modal BUMD}}{\text{Target Laba penyertaan modal BUMD}}$$

-----  
--

Target Laba penyertaan modal BUMD

Bila telah dihasilkan rasio realisasi dengan anggaran laba maka dapat dilihat tingkat efektivitasnya. Tingkat efektivitas menurut A.A.N Dwirandra (<http://ejournal Unud.Ac.id>) adalah sebagai berikut :

NO	PROSENTASE	TINGKAT EFEKTIVITAS
1.	>100	Sangat Efektif
2.	>90-100	Efektif
3.	>80-90	Cukup Efektif
4.	>60-80	Kurang Efektif
5.	<60	Tidak Efektif

**TAHAPAN KEGIATAN PENELITIAN**

- A. Koordinasi dengan instansi terkait
- B. Pengumpulan data primer dan data sekunder
- C. Membuat kajian
- D. Wawancara dengan petugas
- E. Analisis kajian
- F. Laporan akhir hasil kajian

**PEMBAHASAN**

**PDAM Kab.Lamongan**

Untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, untuk tahun 2010 - 2014, belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan, sebab untuk 5 tahun terakhir kondisi Kinerja PDAM Kabupaten Lamongan mengalami Kerugian, sebab laba yang diperoleh tidak mampu menutupi beban operasional pada PDAM Kabupaten Lamongan hal ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel IV.1b

Perbandingan Rasio Asset Perusahaan Dengan Kewajiban

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Total Asset	25.947.121.153	24.065.004.575	24.286.197.555	49.390.301.345	37.850.177.132
2	Total Kewajiban	29.919.773.615	30.383.525.252	27.990.789.865	29.154.993.564	28.930.833.611
	Jumlah	(3,972,652,462)	(6,318,520,677)	(3,704,592,310)	20,235,307,781	8,919,343,521

Pada kondisi pertumbuhan kinerja keuangan diatas bisa dilihat bahwa perbandingan rasio antara asset perusahaan dengan kewajiban dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memperlihatkan bahwa asset perusahaan yang dimiliki < kewajiban yang harus dibayar. Artinya pendapatan atau asset yang dimiliki tidak bisa menutupi kewajiban yang dibayar. Karena

lebih besar kewajibannya dari pada assetnya.

Untuk menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mencetak laba maka perlu melihat ikhtisar laporan Rugi/Laba perusahaan. Karena bisa dilihat dari sumber pendapatan yang paling banyak yang memberikan keberhasilan perusahaan dalam mengambil laba.

Tabel 7.2a  
**Pertumbuhan Kinerja Keuangan**  
**Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2014**

No	Potensi	2010	2011	2012	2013	2014
1	Asset	25.947.121.153	24.065.004.575	24.286.197.555	49.390.301.345	37.850.177.132
2	Kewajiban	29.919.773.615	30.383.525.252	27.577.034.965	29.154.993.564	28.930.833.611
3	Modal	27.749.371.974	28.502.371.974	30.502.371.974	51.833.750.674	42.002.371.974
4	Pendapatan Usaha	7.925.356.100	8.255.456.117	9.139.400.931	13.019.858.660	15.417.429.640
5	Biaya Langsung Usaha	6.723.752.394	7.263.457.916	7.237.360.427	8.398.776.698	13.859.533.697
6	Biaya Umum & Administrasi	2.738.981.810	4.046.438.669	3.850.256.085	4.379.654.937	40.809.473
7	Laba (Rugi) Setelah Pajak	(1.448.240.353)	(2.873.135.300)	(1.949.278.744)	1.123.935.831	1.517.086.470

Sumber Data : PDAM, Kab. Lamongan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber pendapatan PDAM setiap tahun dari 2010 sampai 2014 mengalami kenaikan, tetapi di lain

sisi pada beban baik itu beban langsung usaha dan beban administrasi & umum mengalami kenaikan. Sehingga pada

pertumbuhan kinerja keuangan pada PDAM mengalami kerugian.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan efektivitasnya menunjukkan bahwa Bagian Laba Penyertaan Modal BUMD di kabupaten Lamongan tahun 2010 sampai tahun 2014 semakin menurun tingkat efektivitasnya, meskipun demikian masih dalam kriteria sangat efektif. Dengan hasil tersebut maka, Penyertaan Modal BUMD adalah satu sumber pendapatan yang potensial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Tetapi PDAM sangat tidak efektif karena laba yang didapat lebih kecil dari kewajiban yang dibayarkan.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan mencermati upaya optimalisasi Laba Perusahaan Daerah

Kabupaten Lamongan yang telah di paparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perbaiki Kerja BUMD agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Membentuk Lembaga Pasar Modal untuk menyediakan dana yang murah dan mudah diperoleh Pemerintah Daerah.
3. Evaluasi secara periodik.
4. Pengawasan secara langsung di lapangan kepada masing-masing Perusahaan Daerah.

5. Memberikan Reward khusus pada Perusahaan daerah dan Perhatian khusus agar Perusahaan Daerah Semakin bersemangat.
6. Melakukan Pembinaan Khusus pada SDM.
7. Perluasan Jaringan dengan stakeholder Perusahaan daerah terutama investor.
8. Melakukan proses penyehatan perusahaan secara menyeluruh dengan meningkatkan kompetensi manajemen dan kualitas SDM.
9. Mengarahkan BUMD untuk dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi dengan pengelolaan yang bersih, transparan dan profesional

Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut :

### **PDAM**

Dilihat bahwa sumber pendapatan PDAM didapatkan dari Penjualan Air, Non Air dan Pendapatan Non usaha. Apabila kita lihat yang paling banyak didapatkan dari penjualan Air bersih, mungkin dalam hal ini untuk menambah pendapatan PDAM, dengan cara meningkatkan tarif Air bersih secara berkala agar bisa sedikit menutupi beban dan kewajiban. Sebab air merupakan sumber kehidupan jadi semua orang butuh air, meskipun dinaikkan sedikit tarifnya orang tetap mengkonsumsi air.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang *Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*

Undang-undang RI No.28 tahun 2009 tentang *Pajak daerah dan pendapatan daerah*

- Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi.Tangkilisan, dan Hessel N.S. 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta : PT.Grassindo
- Susanto A.B, Ghifari A.B, Susanto A, Suradinata E, Wijanarko H, Supranto J, Karmaji, Oyong R, Nurbaya S dan Marth S, 2010, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jakarta : Esensi Erlangga Group.
- Halim Abdul, Kusufi S.M, 2013, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Perda No.5 tahun 2008 tentang *PDAM Kab.Lamongan*